

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan jumlah pulau mencapai 17.508, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta memiliki garis pantai terpanjang kedua secara global setelah Brasil (Dahuri, 1996). Kondisi geografis tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya keragaman etnis dan budaya yang sangat kompleks. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, tercatat bahwa Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.340 kelompok suku bangsa. Keanekaragaman budaya ini mencerminkan kearifan lokal yang khas, dengan berkembang melalui proses internalisasi yang lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika manusia berinteraksi dengan lingkungannya, nilai-nilai yang kuat terbentuk, yang dapat ditemukan dalam hukum lokal, keyakinan, dan budaya (Ernawi, 2009:7). Kearifan lokal di definisikan sebagai cara pandang, pengetahuan, dan berbagai strategi hidup yang diterapkan oleh masyarakat setempat dalam bentuk aktivitas untuk mengatasi berbagai masalah demi memenuhi kebutuhan mereka (Departemen Sosial RI, 2006).

Melalui masyarakat lokal meyakini bahwa karena keduanya diciptakan oleh Tuhan, Manusia dan Alam merupakan satu kesatuan. Alam dianggap memiliki dua "roh" sehingga jika diperlakukan dengan baik, alam akan baik tetapi bisa marah jika dirusak. Kearifan lokal dalam hal ini mencakup prinsip religius dan spiritual yang universal. Terlepas dari, kearifan lokal mencakup nilai-nilai religius dan spiritual yang bersifat universal. Meskipun berakar dari budaya lokal, nilai-nilai ini dapat

dikombinasikan dengan pendekatan empiris dan rasional, misalnya dalam mitigasi bencana alam (Permana et al., 2011). Kearifan lokal sendiri merujuk pada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman komunitas dan merupakan akumulasi pengetahuan setempat pada tingkat masyarakat, kelompok, maupun individu (Kongprasertamorn, 2007:2). Dengan keberagaman kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap wilayah di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk salah satu upaya mengurangi bencana. Setiap masyarakat memiliki cara yang berbeda untuk memahami dan mengenali wilayah mereka, yang menghasilkan metode mitigasi bencana yang didasarkan pada kearifan lokal. Sebelum kemajuan teknologi saat ini, masyarakat lokal telah belajar lebih jauh untuk mengenali wilayahnya. Menurut (Puspitasari et al., 2018).

Dalam konteks mitigasi bencana banjir yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat setempat, kearifan lokal dipahami sebagai seperangkat pandangan hidup, pengetahuan, serta strategi yang dikembangkan dan diwariskan oleh komunitas lokal untuk merespons permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam literatur internasional, kearifan lokal dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *local wisdom*, *local knowledge*, dan *local genius*, yang merujuk pada kebijakan, pengetahuan, serta kecerdasan khas suatu komunitas (Fajarini, 2014). Dalam beberapa dekade terakhir, diskursus mengenai kearifan lokal semakin memperoleh perhatian, terutama dalam kaitannya dengan peran masyarakat lokal, di mana konsep ini dimaknai secara beragam sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Kearifan lokal merujuk pada ide-ide yang bijaksana, positif, dan dianut oleh masyarakat setempat. (Sartini, 2004: 111).

Penanggulangan Bencana mendefinisikan sebagai upaya mitigasi serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007. Upaya tersebut diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan, melalui penguatan kesadaran kolektif serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani potensi risiko bencana. Tindakan mitigasi diantaranya usaha untuk menghindari bahaya, memberikan peringatan, dan melakukan evakuasi sebelum terjadinya ancaman. Dengan kata lain, mitigasi merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan mengurangi kemungkinan risiko akibat bencana. Proses ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah untuk menekan risiko, termasuk persiapan dan upaya pengurangan risiko jangka panjang yang dilakukan sebelum bencana terjadi (Wekke 2021).

Mitigasi bencana berkaitan dengan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan sebelum bencana terjadi (Subiyantoro, 2010: 45). Sementara itu, berdasarkan Mitigasi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 Tahun 2003, didefinisikan sebagai penjinakan yaitu serangkaian usaha untuk mengurangi dampak dari bencana yang termasuk tindakan kesiapsiagaan dan kewaspadaan (Permana, et.al 2016). Ada pula Manajemen bencana merupakan langkah awal penting dalam mitigasi, bertujuan mengurangi atau mencegah korban dan kerugian. Fokus utamanya adalah tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi yang dikenal sebagai mitigasi. Pendekatan ini harus diterapkan pada semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam (natural disaster) maupun yang disebabkan dari ulah manusia (man-made disaster). (Wekke, 2021).

Mitigasi merupakan langkah penting yang dilakukan sebelum bencana untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat (Depdagri, 2003 Mitigasi bencana struktural dan non-struktural terdiri dari dua kategori, mitigasi struktural melibatkan penerapan rekayasa teknis pada bangunan agar tahan terhadap bencana untuk mengurangi risiko bencana. Bangunan tahan bencana didefinisikan sebagai konstruksi yang dirancang secara spesifik agar mampu mempertahankan integritas strukturalnya atau hanya mengalami tingkat kerusakan minimal yang tidak menimbulkan risiko keselamatan ketika bencana terjadi. Dalam konteks tersebut, rekayasa teknis merupakan proses perencanaan dan perancangan struktur bangunan yang secara sistematis mempertimbangkan karakteristik dan mekanisme kerja berbagai jenis ancaman bencana (Tasqiya Ratnasari, 2022). Sementara itu, mitigasi bencana non-struktural merujuk pada upaya pengurangan risiko yang tidak berfokus pada pembangunan fisik, melainkan dilaksanakan melalui kebijakan, regulasi pemerintah, serta langkah-langkah strategis lainnya. Pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi beserta kawasan sekitarnya, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa diliputi rasa khawatir yang berlebihan (Ariadi, et.al 2023).

Melalui upaya mitigasi bencana berperan sangat penting karena ada beberapa aktor yang terlibat yaitu Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Komunitas yang berfungsi untuk meminimalkan dampak negatif dari bencana alam terhadap masyarakat. Perencanaan yang baik dalam mitigasi dapat mengurangi kerugian materi, korban jiwa, dan gangguan sosial ekonomi. Upaya mitigasi ini

mencakup tindakan fisik seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan non-fisik seperti pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan tanggap darurat bencana yang mencakup proses pengkajian cepat, seperti pengerahan tenaga manusia, peralatan, logistik, serta upaya penyelamatan terhadap evakuasi korban, dan pemulihan awal yang harus dikelola dengan koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait (Sari et al., 2020). Manajemen upaya pencegahan bencana yang efektif oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sangatlah penting, mengingat Indonesia adalah wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana. (Dewanggajati, 2021).

Penelitian ini mengangkat kasus Banjir, yang terjadi di Kecamatan Karanganyar merupakan peristiwa untuk mencerminkan kompleksitas tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh daerah tersebut. Banjir Karanganyar terjadi di wilayah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kajian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada praktik kearifan lokal yang berkembang di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Salah satu tradisi adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat adalah ritual penyembelihan kambing kendit. Prosesi penyembelihan tersebut dilakukan di atas tanggul Sungai Wulan Karanganyar yang mengalami kerusakan dan menjadi pemicu terjadinya peristiwa banjir. Jenis hewannya bisa berbeda di setiap daerah tergantung makna simbolisnya. Mengenai pilihan kambing kendit garis tersebut menyimbolkan pertemuan. Dengan mencerminkan konsep holistik bahwa manusia adalah bagian dari semesta atau alam, yang merupakan ide dasar dari simbol tersebut. (Agil Trisetiawan Putra, 2024 detik jateng).

Salah satu bencana alam yang sering melanda Kabupaten Demak adalah banjir, terutama di wilayah pesisir Pulau Jawa, dataran rendah, dan bantaran sungai. Kabupaten ini tergolong rawan banjir karena pengaruh Sungai Wulan, yang merupakan percabangan dari Sungai Lusi dan Sungai Serang, dengan aliran air yang ditampung di Bendung Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kabupaten ini termasuk wilayah yang rentan terhadap banjir, salah satunya karena pengaruh Sungai Jratun seluna. Keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) memicu banjir akibat kapasitas sungai yang tidak mencukupi untuk menampung debit air yang tinggi. Dampak negatif banjir ini sangat luas meliputi kerugian materi seperti korban jiwa, penyakit, lingkungan yang rusak, hingga trauma psikologis. Upaya masyarakat sangat penting dalam penanganan banjir, sebab mereka adalah pihak pertama yang mengetahui dan merasakan dampaknya. Kesiapsiagaan tersebut mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku, yang didukung oleh penguasaan keterampilan serta kesiapan sarana dan prasarana dalam upaya pengurangan risiko, peningkatan kewaspadaan, dan penanganan dampak bencana banjir (Suharini, E., dkk., 2017).

Indonesia suatu negara terjadi rawan bencana, dikutip pada catatan BNPB tahun 2010 sampai 2020 bahwa terdapat 24.969 kejadian bencana yang dimasukkan ke dalam DIBI, yaitu Database Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia. Jumlah korban terdampak bencana tercatat mencapai 5.060.778 jiwa, dengan 4.400.809 unit rumah mengalami dampak serta 19.169 fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan di berbagai wilayah Indonesia (BNPB, 2020). Dari berbagai jenis bencana yang terjadi, banjir merupakan peristiwa yang paling dominan. Selain

itu, dalam rentang waktu 1815 hingga 2019, bencana angin puting beliung, tanah longsor, dan kebakaran juga menjadi karakteristik utama bencana yang kerap melanda Indonesia (Fitriani et al., 2021).

Salah satu contoh hal lain bencana nasional dari kearifan lokal bencana banjir Kecamatan Karanganyar Demak, berita tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 membuat masyarakat lebih sadar akan ancaman gempa dan tsunami. Mitigasi bencana adalah budaya *semong* di Pulau Simeulue saat tsunami Aceh 2004. *Semong* merujuk pada gelombang laut yang datang setelah gempa, berdasarkan cerita turun-temurun yang diwariskan ratusan tahun. Berkat pemahaman ini, jumlah korban di Simeulue sangat minim. Masyarakat Aceh juga menjaga kearifan lokal yang menonjol budaya *semong* dan *nandong* berhubungan dengan mitigasi bencana mencerminkan kehidupan sederhana yang berpegang pada adat istiadat. Tradisi ini menjadi alat komunikasi efektif untuk memperingatkan dan menyelamatkan diri dari ancaman tsunami (Umin, 2019).

Sebelum banjir terjadi, penting untuk melakukan sosialisasi mengenai mitigasi bencana banjir melalui penyuluhan dan media massa. Pemerintah juga sebaiknya menyiapkan dana untuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir. Saat banjir berlangsung perlu dibentuk posko penanganan bencana banjir Depkes (2014) dalam Nurrahmah (2015:22). Tindakan upaya dilakukan petugas kesehatan sebelum, saat, dan setelah bencana banjir adalah sebagai berikut:

1. Sebelum terjadinya bencana banjir, langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan meliputi penyusunan peta kerawanan dan jalur evakuasi,

perumusan rencana kontinjensi sebagai pedoman penanggulangan bencana yang disiapkan sejak tahap prabencana, serta peningkatan kegiatan penyuluhan terkait kesehatan lingkungan, Meningkatkan pelatihan kemampuan petugas, dan Mengeruk kedalaman sungai agar tidak jebol.

2. Saat terjadi bencana banjir yaitu, Mengaktifkan unit pelayanan dan pos kesehatan di lokasi, Membersihkan pelayanan kesehatan dan rujukan, penilaian kesehatan yang cepat (Rapid Health Assessment), Mengamankan barang berharga, serta Tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi bencana.
3. Setelah terjadi bencana banjir yaitu, perbaiki kualitas air bersih, Mengawasi penyakit KLB, Membantu perbaikan saluran pembuangan limbah, Bekerjasama menggalang dana untuk korban terdampak banjir, dan Evaluasi antara pemerintah dengan Masyarakat atas penanganan banjir. (Rommiyati, et.al 2024).

Aktor yang terlibat dalam penanganan banjir di Kecamatan Karanganyar meliputi Pemerintah yang dibantu oleh BPBD, PUPR, Dinas Sosial, dan Basnaz. BPBD bertugas mengevakuasi warga terdampak banjir dan melakukan pendataan korban, serta kerusakan infrastruktur termasuk rumah dan sarana pendidikan. PUPR bertanggung jawab atas pembangunan dan perbaikan tanggul sungai, serta sistem drainase untuk mencegah banjir berulang. Dinas Sosial dan Basnaz menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan pakaian. Kemudian ada Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), yang menyediakan layanan kesehatan dan edukasi pencegahan penyakit bagi para korban, serta menyediakan tempat belajar sementara di posko untuk anak-anak yang sekolahnya terendam banjir. Terdapat beberapa komunitas yang membantu pemerintah dalam penanganan banjir di Karanganyar Demak, yaitu PMI, TNI, dan POLRES. PMI bertugas mengevakuasi korban, terutama yang terjebak di lokasi berbahaya menggunakan perahu karet. TNI berperan dalam evakuasi warga dengan peralatan khusus, seperti perahu karet dan truk untuk menjangkau daerah yang sulit. Sementara itu, POLRES bertanggung jawab atas pengamanan dan pengaturan lalu lintas daerah terdampak banjir, untuk kelancaran bantuan logistik dan mencegah kemacetan.

Lokasi Kabupaten Demak di Jawa Tengah adalah 6°43'26" - 7°09'43" LS dan 110°27'58" - 110°48'47" BT. Wilayah ini memiliki luas 89.743 hektar dan berjarak 49 km dari barat ke timur dan 41 km dari utara ke selatan. Secara administratif, Di Demak ada 14 kecamatan, terbagi dari 243 desa dan 6 kelurahan. Seluas 51.799 hektar, atau 57,72% dari wilayahnya, sebagian wilayahnya adalah sawah, sisanya berupa lahan kering, kebun, tambak, dan lahan sementara tidak digunakan. Data bencana dengan hujan deras mengguyur wilayah Demak, Jawa Tengah, sejak Rabu 13 Maret 2024, menyebabkan banjir besar untuk kedua kalinya setelah banjir sebelumnya pada februari. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya enam tanggul yang merendam 89 desa di 11 kecamatan, termasuk Demak, Karangtengah, Sayung, dan Mranggen. Pada 17 Maret, tanggul Sungai Wulan di perbatasan Demak-Kudus kembali jebol. Laporan BPBD Demak pada 18 maret ketinggian air 30-80cm, 93.149 terdampak dan 22.725 mengungsi (Rommiyati, et.al 2024).

Tabel 1.1 Jumlah data Desa di Kecamatan Karanganyar

1. Desa Ketanjung	10. Desa Wonoketingal
2. Desa Undaan Lor	11. Desa Kedungwaru Kidul
3. Desa Undaan Kidul	12. Desa Kedungwaru Lor
4. Desa Karanganyar	13. Desa Ngaluran
5. Desa Wonorejo	14. Desa Tuwang
6. Desa Cangkring B	15. Desa Ngemplik Wetan
7. Desa Cangkring Rembang	16. Desa Jatirejo
8. Desa Kotakan	17. Desa Tugu Lor
9. Desa Bandung Rejo	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2021

Tabel 1.2 Data Bencana Banjir Kecamatan Karanganyar tahun 2024

Berapa kali terjadi	Kronologis	Dampaknya
Dua kali dalam satu tahun di 2024	1. Di tanggal 8-14 februari 2024 ketinggian air mencapai 1- 2m penyebabnya yaitu tanggul di sungai wulan jebol perbatasan antara Demak-Kudus. 2. Di tanggal 18-24 maret 2024 ketinggian sangat parah mencapai 3meter lebih, ini penyebabnya tanggul Sungai wulan jebol lagi dari berbagai lambung sehingga ada dua titik yang jebol. tetapi ada tambahan tanggul sungai jeratun mempercepat aliran air berbagai kecamatan Demak	Beberapa aspek yang berdampak pada banjir di karanganyar demak: 1. Kerusakan Infrastruktur yang menyebabkan pada jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya, serta mengganggu akses masyarakat, penggunaan jalan pantura terkena macet. Puluhan ribu warga mengungsi yaitu 28.027 jiwa mengungsi, terdapat 7 kecamatan, 38 desa, 1.012 hektar sawah, 2 rumah ibadah, 58 rumah warga rusak, 6 sarana Pendidikan 2. Kerugian ekonomi menyebabkan banyak rumah dan lahan pertanian semua terendam air, berdampak kerugian finansial bagi warga. Karena pendapatan mereka dari pekerjaan sehari-hari pertanian dan perdagangan menjadi terhambat. 3. Masalah kesehatan banjir sering mengakibatkan pencemaran air yang dapat meningkatkan risiko penyakit potensial KLB atau wabah dan kesehatan lingkungan seperti infeksi kulit, diare penyakit lainnya.

Sumber: Saifudin, M. (2024, 11 Februari). <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7187221/update-banjir-karanganyar-demak-28-037-jiwa-mengungsi>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada peristiwa mitigasi bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Karanganyar Demak dalam mitigasi bencana banjir?
2. Bagaimana upaya Tata Kelola pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir berulang Demak di Kecamatan Karanganyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari sebuah peristiwa Bencana banjir yang di kaitkan pada Kearifan Lokal di Kecamatan Karanganyar Demak. Peneliti ini memiliki sebuah gagasan untuk memberikan pemahaman mengenai beberapa tujuan peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bahwa kearifan lokal menjadi bagian dalam fenomena sosial yang mendukung pada keputusan mitigasi bencana dan keberhasilannya.
2. Untuk menganalisis respon pemerintah dengan upaya menanggulangi banjir ketika itu menguntungkan pada mitigasi bencana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk menambah kekayaan ilmu pengetahuan mengenai peningkatan pemahaman tentang kearifan lokal yang

terlibat dalam mitigasi bencana banjir. Serta dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat setempat tentang pentingnya melestarikan keragaman suku dan budaya, dengan respon pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi banjir Demak di Kecamatan Karanganyar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi pembelajaran sekaligus sebagai referensi untuk memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi pembaca.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjadi arahan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, memungkinkan penulis untuk memperkuat kerangka teoritis yang digunakan dan sebagai pedoman dalam mengevaluasi penelitian yang sedang dilakukan. Penulis telah menyiapkan daftar penulis yang relevan dengan fokus topik untuk diselidiki dalam penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu:

Suci Maharani "Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Dalam Mitigasi Bencana di Kota Pariaman" (2019). Berdasarkan teori kearifan lokal, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk kearifan lokal yang terkait pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana serta bernilai manfaat. Fokus penelitian adalah menggali sistem sosial dan budaya masyarakat pesisir Kota Pariaman. Dengan metode kualitatif dan teknik purposive sampling, hasil menunjukkan masyarakat pesisir cenderung mengintegrasikan sistem religi melalui tradisi keagamaan, mitos, dan legenda sebagai pengetahuan lokal tentang kondisi

alam sebelum bencana terjadi. Masyarakat pesisir pantai, yang memiliki banyak tradisi keagamaan, percaya bahwa pulau-pulau kecil di sekitar laut Kota Pariaman akan melindungi mereka dari bencana, serta tradisi "hoyak tabuik" untuk menanam cemara dan mangrove di pesisir pantai.

“Peran Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana: Studi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Longsor di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor” oleh Randy Raharja, Faisal Grahadi Wibowo, Riski Vitria Ningsih, dan Sari Viciawati Machdum (2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bojongkoneng dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor, sekaligus mengkaji strategi masyarakat dalam mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta berlandaskan pada teori kearifan lokal sebagai kerangka analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Bojongkoneng, termasuk pemanfaatan rumah panggung yang dapat mengurangi dampak longsor, pantangan terhadap kerusakan lingkungan, dan prediksi terjadinya bencana longsor melalui cerita yang diwariskan turun-temurun. Namun, kearifan lokal mulai memudar karena masuknya pembangunan yang mengubah cara hidup masyarakat, terutama persepsi tentang rumah sebagai tempat tinggal.

“Mitigasi Bencana Terhadap Desa Penyangga Studi Kasus: Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang” oleh Nikmatil Islamiyah (2023). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang mitigasi bencana yang ada di Desa Sidomulyo serta meneliti kesiapsiagaannya sebagai desa penyangga. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif-kualitatif yakni dengan teknik studi pustaka dan wawancara melalui teori Particiopation Action Research (PAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, telah memiliki program kerja yang berorientasi pada upaya penanggulangan bencana bagi masyarakat, sekaligus menjalankan peran strategis sebagai desa penyangga dalam upaya perlindungan dan pelestarian kawasan cagar alam. Namun demikian, diperlukan penyelenggaraan program pelatihan mitigasi bencana yang berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas dan wawasan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

“Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang Tahun 2020” oleh Angger Ari Praditiya, Nur Hidayat Sardini (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk manajemen bencana yang diterapkan serta tingkat partisipasi masyarakat di wilayah DAS Tenggang dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori manajemen bencana dan teori partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan variasi bentuk pengelolaan bencana serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir di wilayah DAS Tenggang, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. BPBD Kota Semarang telah melaksanakan normalisasi sungai sebagai strategi penanggulangan bencana banjir, namun

minimnya pelibatan masyarakat memicu terjadinya ketidaksinkronan informasi. Keterbatasan pengetahuan dan diseminasi informasi dari pemerintah mengakibatkan efektivitas penanganan banjir belum optimal. Di sisi lain, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, yang tercermin dari perilaku pembuangan sampah ke sungai oleh sebagian warga DAS Tenggong, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan dan pengetahuan.

“Kapasitas Kelembagaan dan Kearifan Lokal Dalam Antisipasi Penanggulangan Bencana Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Balerante Kecamatan Kemalang)” oleh Galih Marendra (2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 di Kabupaten Klaten, sekaligus mengidentifikasi potensi kearifan lokal dalam upaya antisipasi penanggulangan bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif serta berlandaskan teori kelembagaan, kearifan lokal, dan manajemen bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan persetujuan terhadap aspek manajemen bencana, dengan 62% responden menyatakan setuju dan 15% sangat setuju. Temuan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, dukungan pendanaan dan donatur, yang berkontribusi dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam merespons aktivitas dan gejala Gunung Merapi.

“Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menghadapai Banjir di Kelurahan 5 Ulu, Kota Palembang” oleh Robby, Eni Heldayani, Heri Setianto (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk serta nilai-nilai

kearifan lokal masyarakat Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, dalam menghadapi bencana banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat tercermin dalam pengetahuan lokal, seperti kemampuan memperkirakan periode rawan banjir, serta praktik adaptif berupa pelestarian arsitektur tradisional, seperti rumah panggung dan rumah rakit, yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan meminimalkan risiko banjir. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal diwujudkan melalui budaya gotong royong dan kegiatan pembersihan lingkungan sebagai bentuk antisipasi terhadap bencana banjir.

Dari ke enam hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian yang ditulis oleh Suci Maharani, Robby, Angger Ari Praditiya, Galih Mahendra dan Randy Raharja difokuskan untuk menganalisis mengenai kearifan lokal masyarakat dalam pencegahan mitigasi bencana dan mengetahui bagaimana bentuk serta nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat. Menggunakan teori tentang kearifan lokal dan teori manajemen bencana, bahwa yang hampir sama banyaknya pada teori dari kelima penulis tersebut. Dengan demikian, kesimpulannya adalah perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis terletak pada landasan teori dan pembahasannya serta fokusnya sama-sama di kearifan lokal dengan lokasi penelitian yang berbeda. Adapun teori yang penulis gunakan sebagai landasan untuk menganalisis kajian tersebut antara lain konsep kearifan lokal dan teori mitigasi bencana. Selain itu, penelitian yang dilakukan di Dukuh Norowito Desa

Ketanjung, Kecamatan Karanganyar Demak ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulis berpikiran bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaharuan dan menjadi manfaat dalam ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Utama

Teori Mitigasi Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat, baik akibat faktor alam, non-alam, maupun aktivitas manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan dampak psikologis yang melebihi kemampuan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana didefinisikan sebagai kejadian yang menimbulkan kesulitan, kerugian, atau penderitaan (Wekke, 2021).

Menurut Ari Sandhyavitri (2014) Mitigasi bencana mencakup sejumlah tindakan untuk menekan kemungkinan terjadinya bencana, baik melalui konstruksi infrastruktur, kampanye untuk meningkatkan pengetahuan, serta penguatan keterampilan komunitas dalam menghadapi situasi bencana. Menurut Soewarno (2011), banjir merupakan peristiwa meluapnya aliran sungai yang melampaui batas tanggul alami maupun buatan. Bencana ini umumnya dipicu oleh intensitas curah hujan tinggi yang tidak diimbangi oleh kapasitas sistem drainase yang memadai, serta dapat diperparah oleh kegagalan sistem aliran air, sehingga menyebabkan genangan pada wilayah-wilayah dataran rendah (Ajami, dkk. 2016).

Sebelum pelaksanaan upaya mitigasi bencana untuk menekan risiko dan dampak yang ditimbulkan, diperlukan perumusan kebijakan dan strategi mitigasi yang komprehensif. Mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya berkelanjutan yang bertujuan mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan aset material (Giri Wiarto, 2017). Berdasarkan pemahaman tersebut, mitigasi merupakan tahapan prabencana yang harus dipersiapkan secara sistematis guna meminimalkan konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu bencana, yang selanjutnya diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan strategi mitigasi:

1. Kebijakan Mitigasi Bencana

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain:

- a) Setiap upaya mitigasi bencana harus membangun persepsi yang seragam di antara seluruh pihak, baik aparat pemerintah maupun masyarakat, sesuai dengan ketentuan langkah yang diatur. Hal ini dilaksanakan melalui pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing unit.
- b) Pelaksanaan mitigasi bencana dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.

- c) Upaya preventif diprioritaskan sebagai langkah utama untuk menekan tingkat kerusakan dan jumlah korban jiwa.
- d) Selain itu, penguatan kapasitas dilakukan melalui kerja sama lintas pihak, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan kampanye secara berkelanjutan.

2. Strategi Mitigasi Bencana

Pelaksanaan kebijakan dapat dikembangkan dengan beberapa strategi antara lain, sebagai berikut:

a) Pemetaan

Strategi pemetaan memiliki peran krusial dalam mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya dalam upayaantisipasi bencana alam. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal, yang disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain :

- 1) Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan.
- 2) Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik.
- 3) Peta bencana belum terintegrasi.
- 4) Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.

b) Pemantauan

Pengetahuan mengenai tingkat kerawanan secara dini dapat dilakukan dengan melalui antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Sehingga akan mudah melakukan penyelamatan, pemantauan di daerah vital, strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.

c) Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi dilakukan dengan cara memberikan poster bagi seluruh warga sekolah tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana di suatu kawasan tertentu.

d) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan warga sekolah dalam menghadapi bencana jika sewaktu- waktu terjadi. Hal mendasar yang perlu dipahami oleh seluruh warga sekolah mencakup pemahaman tentang pola hidup selaras dengan alam di wilayah rawan bencana, identifikasi perilaku dan aktivitas yang harus dihindari, serta

pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri apabila bencana terjadi.

e) Pelatihan atau Pendidikan

Pelatihan diarahkan pada prosedur evakuasi dan penyelamatan saat bencana terjadi, dengan penekanan pada alur koordinasi antara petugas lapangan dan warga sekolah hingga tahap evakuasi serta penanganan korban, guna membangun tingkat kesiapsiagaan yang optimal dalam menghadapi bencana.

f) Peringatan Dini

Peringatan dini adalah mekanisme penyampaian informasi hasil pemantauan berkelanjutan di wilayah rawan bencana, bertujuan agar kesiapsiagaan dapat dilakukan lebih awal. Sistem ini disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi dampak bencana.

Dengan menggabungkan Teori Mitigasi Bencana dan pendekatan Tata Kelola Kebencanaan (disaster governance), penelitian ini melihat bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur. Tetapi juga pada sistem kebijakan, koordinator aktor, serta integrasi pengetahuan lokal masyarakat. Mitigasi bencana tidak hanya dipahami sebagai upaya teknis untuk mengurangi risiko bencana, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dalam

sistem pemerintahan. Namun dalam praktiknya, efektivitas mitigasi dipengaruhi oleh tata kelola kebencanaan (disaster governance), yaitu bagaimana pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya yang berkolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan governance menekankan pentingnya koordinasi antar aktor, pembagian peran institusi, serta partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah tetapi pada integrasi pengetahuan kearifan lokal masyarakat sebagai bagian dari sistem tata kelola penanggulangan bencana.

Aktor yang terlibat pada permasalahan bencana banjir ini yaitu Pemerintah, karena Pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama ikut memberikan bantuan pada korban banjir dan melakukan pemulihan pascabencana banjir. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sekaligus kewenangan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati atau wali kota bertindak sebagai penanggung jawab utama, sementara gubernur berperan dalam memberikan dukungan dan penguatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memikul sejumlah kewajiban, antara lain penyediaan anggaran penanggulangan bencana, integrasi kebijakan kebencanaan ke dalam pembangunan daerah, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, pelaksanaan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pemulihan pascabencana (Heryati, 2020).

Pemerintah dan Program Kesiapsiagaan Bencana dengan Peran Serta Masyarakat. Secara teoritis, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Sistem kesiapsiagaan (Namanya bervariasi sesuai negaranya) bergantung pada koordinasi berbagai sektor yang mengemban tugas-tugas sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap tingkat risiko bencana pada suatu wilayah perlu dilakukan secara menyeluruh sebagai dasar perumusan kebijakan.
2. Penerapan standar dan regulasi harus dijalankan secara konsisten untuk memperkuat upaya mitigasi.
3. Selain itu, pengelolaan sistem komunikasi, informasi, dan peringatan menjadi elemen penting dalam mendukung kesiapsiagaan.
4. Mekanisme koordinasi dan respons juga harus dijamin berjalan efektif.
5. Di samping itu, ketersediaan serta mobilisasi sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya perlu dipastikan guna meningkatkan kesiapan dan mendukung penanganan bencana saat situasi darurat terjadi.
6. Mengembangkan program pendidikan masyarakat.
7. Mengoordinasi penyampaian informasi pada media massa.
8. Mengoordinasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respons atau tanggapan (PAHO), 2006).

1.6.2 Konsep Pendukung

Kearifan lokal merupakan konstruksi identitas kultural suatu bangsa yang memungkinkan terjadinya proses internalisasi dan transformasi unsur budaya eksternal menjadi karakter dan kapasitas kolektifnya (Wibowo, 2015). Konsep ini merepresentasikan akumulasi pengetahuan yang terbentuk melalui pewarisan antargenerasi maupun hasil adaptasi terhadap dinamika budaya,

serta berfungsi sebagai mekanisme interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan alam dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Damardjati dkk, 2013).

Menurut Njatrijani (2018), kearifan dipahami sebagai pandangan hidup, pengetahuan, serta strategi adaptif yang diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat lokal untuk menjawab berbagai persoalan pemenuhan kebutuhan. Secara etimologis, kearifan lokal tersusun atas unsur wisdom dan local, yang dalam kajian akademik juga dikenal sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge), dan kecerdasan setempat (local genius). Dengan perkembangannya kearifan lokal bisa dilihat dari filsafat atau pihak-pihak yang menciptakan budaya dan pengetahuan tersebut.

Konsep kearifan lokal pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales pada periode 1948–1949 sebagai kemampuan kebudayaan lokal dalam merespons dan beradaptasi terhadap pengaruh budaya asing ketika terjadi interaksi antarbudaya (Rosidi, 2011). Sejalan dengan itu, Haryati Soebadio memaknai local genius sebagai identitas kultural bangsa yang memungkinkan terjadinya proses seleksi, penyerapan, dan pengolahan unsur budaya luar sesuai dengan karakter serta kapasitas internalnya (Ayatrohaedi, 1986). Moendardjito menegaskan bahwa unsur budaya lokal yang bersifat potensial adalah unsur yang telah teruji daya tahannya, ditandai oleh kemampuan bertahan dari pengaruh eksternal, mengakomodasi dan mengintegrasikan unsur budaya asing, mengendalikan proses adaptasi budaya, serta memberikan arah bagi perkembangan kebudayaan.

Sehubungan dengan penelitian ini mengacu definisi kebudayaan menurut Geertz (dalam Saifuddin, 2005:288): (1) suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol dengan makna yaitu simbol tersebut individu yang mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, serta membuat penilaian mereka; (2) suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis melalui bentuk-bentuk simbol, memungkinkan manusia berkomunikasi, memperkuat, dan mengembangkan pengetahuan serta sikap terhadap kehidupan; (3) suatu peralatan simbolik bagi mengontrol perilaku, menjadi sumber-sumber ekstrasomatik dari informasi, dan; (4) oleh karena kebudayaan adalah suatu sistem simbol, makna proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan, dan diinterpretasi.

Indikator dalam kearifan lokal memiliki tahap petunjuk ada tokoh adat atau ketua adat setempat dan komunitas adat lokal. Namun, setiap sistem sosial budaya yang terbentuk melalui kontrak sosial memiliki kekhasan tersendiri yang dikenal sebagai sense of autonomy. Sense of autonomy pada komunitas adat lokal yang berkembang secara historis mencakup spektrum yang luas, tercermin dalam ekspresi seni dan budaya, arsitektur tradisional, sistem kekerabatan dan struktur sosial, mekanisme musyawarah dan penyelesaian konflik, tata kelola pembangunan sarana publik, etos kerja, sistem kepercayaan dan ritual, hingga pola pikir serta pandangan hidup masyarakat (Laurensius, 2018). Seluruh unsur yang membentuk sense of autonomy pada komunitas adat bertransformasi menjadi kearifan lokal (local wisdom) yang menjadi pedoman hidup komunitas tersebut. Potensi kerukunan sosial muncul dari budaya dan

kearifan lokal, di mana setiap komunitas memiliki nilai luhur yang berasal dari ajaran agama maupun tradisi nenek moyang. Kearifan lokal mengadopsi prinsip, norma, dan perilaku leluhur yang relevan untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai fenomena kontemporer.

Dalam konteks kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Karanganyar dapat dipahami dari mekanisme Tata Kelola mitigasi berbasis komunitas masyarakat, yang dimana nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah warga, serta tradisi lokal berfungsi sebagai instrument sosial untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir.

Kearifan lokal yang dimaksud merujuk pada tradisi sedekah bumi yang hingga kini tetap dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga berfungsi sebagai wujud kebudayaan lokal masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya (Kuswaningsih et al., 2024). Pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang fenomena sosial dari persoalan makna tradisi dari sedekah bumi, pelaksanaan tradisi sedekah bumi, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam tradisi sedekah bumi terhadap penyembelihan kambing kendit dengan banjir yang terjadi berulang di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan suatu proses menurunkan adanya konsep penelitian yang ada menjadi beberapa bagian atau dimensi yang lebih rinci agar dapat dengan mudah dipahami dan diukur. (Nawar, 2015: 63). Dalam

penelitian ini, memiliki tujuan untuk mengetahui kearifan lokal nanti akan menjadi bagian fenomena dalam fenomena sosial yang mendukung pada keputusan mitigasi bencana dan keberhasilannya. Kemudian bagaimana kearifan lokal nantinya dapat diakomodasikan ketika itu menguntungkan bagi upaya mitigasi bencana.

Tabel 1.1

Konsep	Dimensi Konsep	Indikator Konsep
Konsep Kearifan Lokal menurut Laurensius (2018).	1. Tahap Petunjuk	1. Tokoh adat atau ketua adat nantinya menjadi pembuktian jika kearifan lokal itu menjadi bagian fenomena sosial. 2. Komunitas Adat lokal setiap suku atau komunitas memiliki nilai luhur tersendiri baik yang mereka adopsi dari ajaran agama maupun dari tradisi nenek moyang agar dapat membuktikan kearifan lokal tersebut.
	2. Fenomena Sosial	1. Persoalan makna tradisi dari sedekah bumi. 2. Pelaksanaan tradisi sedekah bumi. 3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam tradisi sedekah bumi di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kec Karanganyar.

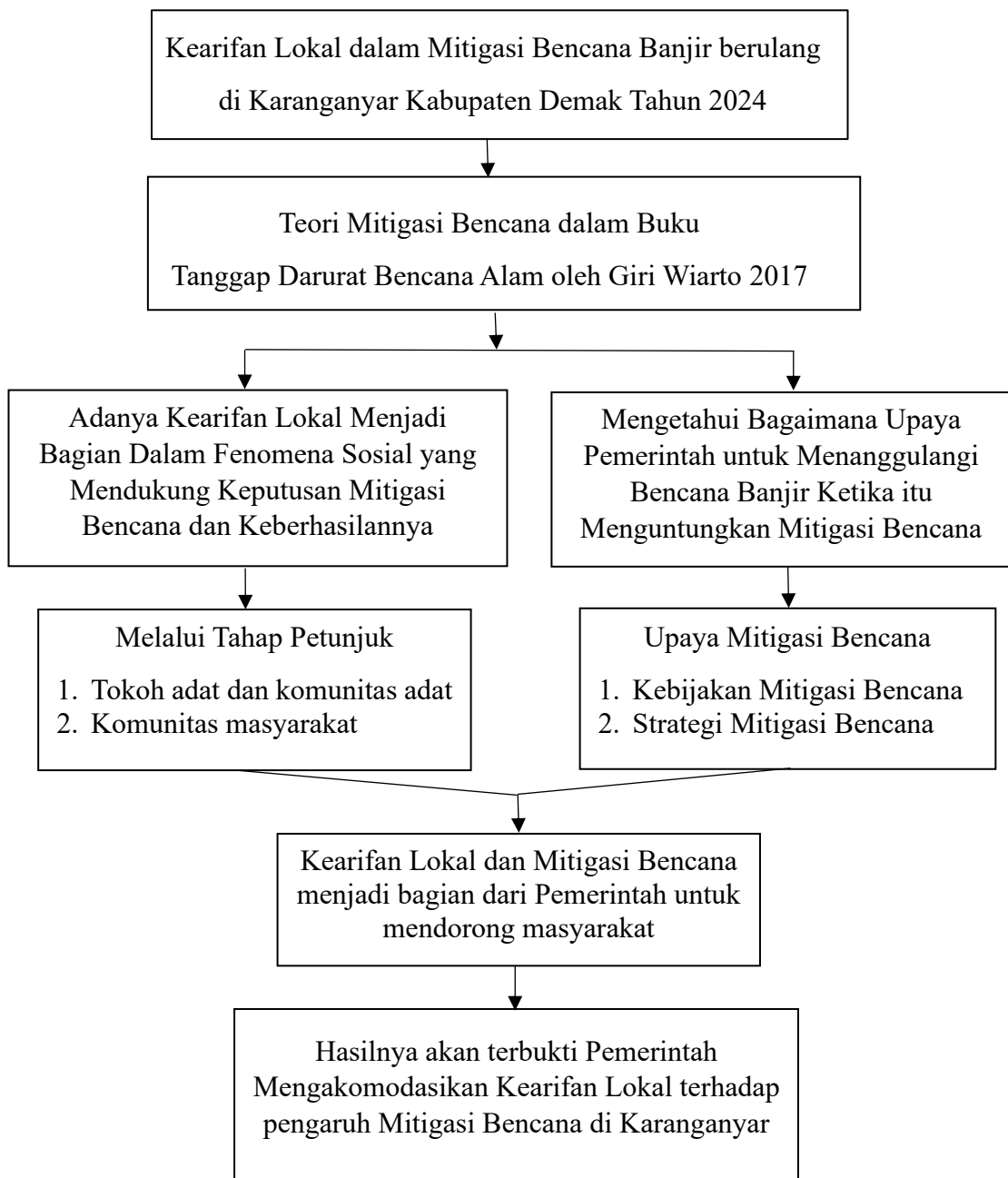
Mitigasi Bencana dalam buku tanggap darurat bencana alam oleh Giri (2017)	1. Tahap Upaya	1. Kebijakan mitigasi bencana perlu membangun persepsi untuk ditempuh upaya-upaya dalam tindakan yang ditimbulkan dari bencana 2. Strategi mitigasi bencana ini menjadi melaksanakan kebijakan yang dapat dikembangkan dengan beberap strategi dalam mitigasi bencana banjir.
	2. Kebijakan Mitigasi Bencana	1. Setiap upaya mitigasi bencana menuntut terbangunnya kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan, baik aparat pemerintah maupun unsur masyarakat, dengan tahapan pelaksanaannya yang diatur secara jelas. 2. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. 3. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan 4. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.
	3. Strategi Mitigasi Bencana	1. Pemetaan berperan strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam. 2. Pemantauan kerawanan secara berkelanjutan

		memungkinkan dilakukannya langkah antisipatif sejak dini terhadap kemungkinan bencana. 3. Diseminasi informasi dilaksanakan melalui penyediaan media edukatif, seperti poster, kepada seluruh warga sekolah mengenai pengenalan, pencegahan, dan penanganan bencana. 4. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang mencakup berbagai aspek kebencanaan bertujuan meningkatkan tingkat kewaspadaan serta kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi bencana. 5. Pelatihan dan pendidikan kebencanaan difokuskan pada prosedur evakuasi dan upaya penyelamatan apabila bencana terjadi. 6. Sistem peringatan dini diterapkan untuk menyampaikan informasi hasil pemantauan aktivitas secara berkesinambungan di wilayah rawan bencana.
--	--	--

1.8 Kerangka Berpikir

Bagan 1.1

Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang berorientasi pada pemaknaan subjektif individu atau kelompok terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2009 dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pemilihan informan dilakukan secara purposif dan berkembang melalui teknik snowball hingga mencapai kejenuhan data, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dan aktif dalam proses pengumpulan data di lapangan (Gunawan, 2013). Menggunakan metode pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan hasil data. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi banjir di Demak, kepada masyarakat berbasis kearifan lokal dalam mitigasi bencana banjir berulang yang terjadi di Kecamatan Karanganyar, dengan upaya mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum bencana terjadi. Serta menjadi bagian dalam fenomena sosial yang mendukung pada keputusan mitigasi bencana dan keberhasilannya.

1.9.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Dukuh Norowito, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dengan objek pertama adalah masyarakat yang terkena musibah bencana banjir dan ketua adat pada permasalahan kearifan lokal saat bencana banjir tersebut terjadi dua kali. Serta aktor penting yang terlibat yaitu Pemerintah untuk penanggulangan mitigasi bencana dan data yang lebih rinci akan dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan

Dan Pencegahan Banjir (BPBD) Kabupaten Demak. Bahwasannya nanti dapat menemukan informasi tentang kebijakan-kebijakan terhadap penanggulangan yang dilakukan di Demak, dan nantinya akan dilakukan di Dinas Pemerintah lainnya Kabupaten Demak untuk mendapatkan informasi dan data.

1.9.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini memiliki peran penting yang dimiliki pengetahuan informan dalam pencarian data. Termasuk aktor merupakan subjek dari penelitian yang terlibat dalam proses pengelolaan bencana banjir, sedangkan untuk objek dalam penelitian ini adalah kepentingan antara pemerintah dan masyarakat lokal yang terlibat dalam masalah bencana banjir di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang dikaitkan dengan kearifan lokalnya.

Tabel 1.3 Profil Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Informan 1	Kepala Operasi Pemeliharaan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Demak
2.	Informan 2	Tim kerja lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Demak
3.	Informan 3	Kepala Pemerintah Desa Ketanjung, Dukuh Norowito, Kecamatan Karanganyar, Kabupten Demak.
4.	Informan 4	Kepala Pemerintah Desa Karanganyar, Kantor Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.
5.	Informan 5	Masyarakat di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis data yang dikumpulkan data penelitian adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode wawancara dan observasi dalam pengumpulan data. Dan sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis antara lain, yaitu :

a. Data Primer

Jenis data yang diperoleh dari informan secara langsung (subjek penelitian), data tersebut diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama dengan beberapa metode umum untuk mendapatkan data primer ini adalah wawancara kepada beberapa informan yang relevan pada pemerintah dan kepala koordinator operasi pemeliharaan drainase, ketua tim kerja BPBD, Pemerintah Desa serta masyarakat di Dukuh Norowito, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar dan observasi penelitian secara langsung tanpa menggunakan perantara orang lain.

b. Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara pihak lain, bukan berasal dari sumber primer. Data tersebut meliputi dokumen, laporan, data statistik, serta bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian, yang bersumber dari berbagai referensi seperti internet, jurnal ilmiah, artikel, dan regulasi pemerintah resmi, termasuk laman resmi Kabupaten Demak.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses dialog terarah yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian. Meskipun, Moelong (2010) menganggap bahwa wawancara sebagai percakapan yang dilakukan dengan adanya tujuan tertentu. Peneliti berbicara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan masalah pada penelitian. Kemudian dilakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir di Kecamatan Karanganyar. Nantinya Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan berkaitan dengan kepentingan terhadap pemerintah dan masyarakat yang menjadi jawaban bahwa kearifan lokal itu menjadi bagian fenomena sosial yang dapat mendukung pada keputusan mitigasi bencana banjir.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung menggunakan pancaindra, dibantu instrumen seperti pedoman, tes, kuesioner, rekaman gambar, atau suara. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu memahami variasi pengamatan dan peran yang dijalankannya (Ulfatin, 2014). Observasi yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data dengan mengamati subjek dan

objek penelitian di Kecamatan Karanganyar. Peneliti mengetahui bahwa kearifan lokal akan menjadi bagian dalam fenomena sosial yang mendukung pada keputusan mitigasi bencana dan keberhasilannya. Serta melihat bagaimana respon pemerintah dalam mengakomodasikan kearifan lokal dapat menguntungkan mitigasi bencana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data hasil wawancara serta observasi, yang dapat berupa dokumen tertulis, visual, maupun karya monumental dari objek penelitian (Ulfatin, 2014). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi isi melalui pemeriksaan data sekunder, mencatat informasi dalam formulir pencatatan dokumen, dan menafsirkan informasi tersebut sesuai dengan isu yang dikaji. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen dengan pelaksanaan tahap upaya kebijakan dan strategi mitigasi bencana serta tokoh adat yang menjadi bukti terkait kearifan lokalnya. Dengan mencatat data sebelumnya yang tersedia, metode pengumpulan data ini akan memungkinkan peneliti untuk memilih dan memilah data yang relevan pada hal-hal yang menjadi fokus penelitian.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2017), analisis data merupakan upaya proses yang melibatkan pengolahan data dengan cara bekerja secara sistematis, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi bagian-bagian yang terkelola, mengidentifikasi hal-hal penting dan memahami apa

yang telah dipelajari, serta menentukan informasi yang relevan untuk disampaikan kepada pihak lain (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam proses analisis data terdapat beberapa komponen utama yang harus dilakukan antara lain, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi memiliki makna yaitu proses menyederhanakan atau mengurangi sebagian elemen dari suatu hal. Sedangkan dalam konteks penelitian, reduksi data adalah langkah memilah data yang telah dikumpulkan selama penelitian guna mengidentifikasi pola dan menentukan informasi penting yang akan disampaikan. Mengingat penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, hal tersebut dapat menghasilkan banyaknya informasi yang besar. Sehingga memerlukan proses menyusun, merangkum berbagai informasi dan mengurangi informasi yang sekiranya tidak relevan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah data display, yakni penyajian data untuk mempermudah penafsiran dan pemahaman informasi penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, data ditampilkan berupa bagan, tabel, atau uraian, sehingga data display lebih banyak berbentuk deskripsi naratif dari berbagai sumber.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi secara sistematis, berdasarkan seluruh data yang terkumpul selama

proses penelitian. Kesimpulan dianggap valid jika konsisten dan didukung oleh bukti data serta data dari lapangan. Dengan demikian, analisis penelitian disimpulkan sesuai dengan perolehan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya (Sidiq & Choiri, 2019).

1.9.7 Kualitas Data

Dalam penelitian ini Kualitas data bergantung pada validitas dan reliabilitasnya (Sugiyono, 2013). Validitas mengacu pada tingkat ketepatan antara data lapangan dan laporan peneliti (Sugiyono, 2010). Maka proses validasi data diperlukan untuk memastikan data yang telah diperoleh memiliki kemampuan untuk benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga data tersebut valid dan sesuai dengan keadaan sebenarnya objek penelitian.

Peneliti memastikan bahwa data yang terkumpul berasal dari sumber yang relevan dan kredibel sesuai dengan penelitian topik. Penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggabungkan berbagai metode, sumber, kemudian peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih beragam dan mendalam mengenai upaya pemerintah dalam merespon untuk menanggulangi bencana banjir dan nantinya masyarakat lokal tersebut menjadi fenomena terkait kearifan lokal pada sosial mitigasi bencana. Sehingga, jika terbukti kejadian kearifan lokal merupakan faktor Tangible atau Intangible, dengan keyakinan atau kepercayaan untuk mengatasi banjir dan tindakan pemerintah dalam mengatasi banjir berulang di Kecamatan Karanganyar 2024.